

ISSN : 2301-7120
PROCEEDINGS

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA GURU
DALAM ERA SERTIFIKASI

Kamis, 14 Juni 2012

Kerjasama Fakultas Agama Islam dengan
Kanwil Kemenag RI DIY



**PROCEEDINGS
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA GURU DALAM ERA SERTIFIKASI
ISSN: 2301-7120**

Tim Penyunting

**Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.
Drs. Nurjiddin, M.Si.
Drs.Miftachul Alfin,M.S.H.R.M.
F. Setiawan Santoso, M. Ag.
Drs. Nashiruddin, M.Ag.**

**Semua artikel dalam proceedings ini telah dipresentasikan dalam
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA GURU DALAM ERA SERTIFIKASI
pada Kamis, 14 Juni 2012
di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta**

**SUSUNAN PANITIA
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA GURU DALAM ERA SERTIFIKASI
Kerjasama**

Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
dan
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kantor Wilayah Prov. D.I. Yogyakarta
Kamis, 14 Juni 2012

Steering Committee :

1. Dr. H. Amin Haedari, M.Pd. (Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag R.I., Jakarta)
2. Drs. Maskul Haji, M.S.I. (Kanwil Kemenag DIY, Yogyakarta)
3. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed. (UM, Malang)
4. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd. (P.P. HKPI, Jakarta)
5. Wendhie Prayitno, S.Kom, M.T., (LPMP Kemendiknas, Yogyakarta)
6. Drs. Tri Wahyu Utomo, M.T., M. Pd. (UCY, Yogyakarta)
7. Dra. Siti Aisyah, M. Ag. (UCY, Yogyakarta)

Organizing Committee

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Drs. Hakiki Mahfudz |
| Wk. Ketua | : | Drs. Nur Abadi |
| Sekretaris | : | Dra. Dhifla Najih M.Si.
Yudiantiwi LD,SE |
| Bendahara | : | Dra. Istifianah M.Ag
Anugrawati, A. Md. |
| Seksi-seksi | | |
| Acara | : | Drs. Taufik Nugroho, M. Ag
Umi Musaropah, S. Hum, M.Pd. I. |
| Humas | : | Drs. Hanani Naseh, M. A.
Bustan Maras, S. Hum., M.A.
Marwan, A. Md. |
| Penyunting | : | Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.
Drs. Nurjiddin, M.Si.
Drs. Miftachul Alfin, M.S.H.R.M.
F. Setiawan Santoso, M. Ag.
Drs. M. Nasrudin, M.Ag. |
| Pelengkapan | : | Surat Nur Wahyudi
Suroto |

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Alhamdulillah wa asy-syukru Lillah wa as-shalatu wa as-salam ala Rasulillah. karena dengan taufiq dan hidayah-Nya serta tuntunan Rasul-Nyalah, kami dapat menyelesaikan penyusunan proceedings artikel-artikel yang disampaikan pada Seminar Pendidikan Nasional “PENILAIAN KINERJA GURU DALAM ERA SERTIFIKASI “ di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta pada Kamis, 14 Juni 2012.

Kami sangat senang sekali karena animo dari narasumber dan kontributor artikel untuk berpartisipasi dalam proceedings sangat besar. Kami berharap penerbitannya ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang penilaian kinerja guru sehingga memudahkan dan membantu penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan. Meski demikian, Kami memohon maaf karena kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan proceedings ini pasti ada, sekaligus berharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam kegiatan seminar serta penyusunan proceedings ini. Semoga dengan penerbitan proceedings ini hingga sampai kepada tangan para pemakalah dan pembaca selesai pula tanggung jawab kami dalam penyelenggaraan seminar nasional ini dengan segala keterbatasannya. Amin.

**Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Yogyakarta, Juni 2012

Tim Penyunting

KATA SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang terhormat, Direktur PAIS, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag R.I.

Yang terhormat, Rektor Universitas Cokroaminoto

Yang terhormat, para peserta seminar.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti Seminar Menjelang PK Guru (Penilaian Kinerja Guru) di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat suri teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang diutus ke dunia ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia.

Tantangan kita dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam semakin hari tidaklah semakin ringan. Di satu sisi, bagi sebagian besar siswa, pelajaran PAI di sekolah boleh jadi menjadi satu-satunya jalan mereka memahami agama Islam. Pada jenjang SD, mungkin sebagian anak-anak masih mendapatkan tambahan wawasan agama dari keikutsertaan mereka di TPA atau pengajian-pengajian di masjid dan mushola. Namun seiring masuknya mereka ke jenjang SMP dan SMA, nyaris hanya dengan 2 jam per minggu itulah mereka berkesempatan memahami Islam.

Di tengah kondisi dangkalnya pemahaman mereka tentang Islam semacam ini, mereka dihadapkan pada tantangan eksternal yang tidak ringan. Keterbukaan akses informasi dan kemajuan teknologi, menjadi tantangan hebat bagi siswa. Belum lagi dengan budaya-budaya negatif yang menghiasi hari-hari mereka, baik yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun yang mereka lihat di berbagai media.

Kita tentu menyambut bahagia terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dikuatkan lagi dengan Permenag No 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Berbagai kebijakan strategis ini diharapkan pada memberikan payung bagi penguatan dan peningkatan mutu pendidikan PAI di sekolah.

Namun, peningkatan mutu ini tidak mungkin terwujud hanya melalui regulasi semata. Diantara sekian banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis.

Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan.

Cita-cita hadirnya para guru profesional ini melahirkan kebijakan sertifikasi guru, yang dilatari oleh sejumlah fakta negatif yang memprihatinkan. Pada tahun 2005, dilansir sejumlah survey yang menyatakan bahwa hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar. Sebanyak 15 persen guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dipunyainya atau bidangnya [*Kompas*, 9/12/2005]. Fakta lain menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai. Berdasarkan statistik, 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17.2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Bila SDM guru kita, dibandingkan dengan negara-negara lain, maka kualitas SDM guru kita berada pada urutan 109 dari 179 negara berdasarkan Human Development Index.¹

Bagaimana mengubah kondisi yang demikian ini menuju kondisi yang ideal? Kata kuncinya, guru harus diajak berubah dengan dilatih terus menerus. Guru harus terus ditingkatkan sensitifitasnya dan kreatifitasnya. Kemampuan paedagogis guru harus dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran dan kualitas pendidikan. Guru harus benar-benar kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen tinggi pada profesinya. Kompetensi guru ini merupakan pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, yang mencakup *Tut Wuri Handayani* [dibelakang memberi dorongan], *Ing Madyo Mangun Karso* [di tengah membangun prakarsa], dan *Ing Ngarso Sung Tulodo* [di depan memberi keteladanan].

Kebijakan untuk melahirkan guru profesional, terwujud dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005. Lahirnya Undang-Undang ini jelas membawa angin segar bagi Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tersebut pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud penghasilan diatas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan profesi ini diberikan bagi guru yang telah memiliki kompetensi dan layak menyandang predikat sebagai

¹Satria Dharma: From :<http://suarakita.com/artikel.html>.

guru professional, yang dibuktikan melalui sertifikasi.

Kebijakan sertifikasi guru ini efektif berjalan mulai tahun 2007 dan berjalan terus hingga saat ini dengan diiringi perubahan-perubahan mekanisme di sepanjang perjalanannya. Untuk guru PAI di wilayah DIY, dari total GPAI yang berjumlah 3.899 guru, hingga akhir tahun 2011 yang telah lulus sertifikasi berjumlah 1.711 orang. Untuk guru madrasah di DIY, dari total berjumlah 6.375 orang yang telah lulus sertifikasi berjumlah 2.674 orang.

Setelah sertifikasi ini berjalan, dan guru-guru yang telah lulus telah mendapatkan tunjangan sertifikasi, apakah sertifikasi ini sungguh-sungguh berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan? Sejumlah penelitian telah dilakukan. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung, yang meneliti tentang sejauh mana dampak sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru dan mutu pembelajaran di sekolah. Populasi penelitian adalah guru-guru SMP yang sudah lulus sertifikasi tahun 2007 dan 2008 di Wilayah Jawa Barat, meliputi Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Kuningan, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kab. Ciamis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru berkorelasi sangat rendah terhadap peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran.²

Pada tahun 2010 juga ada penelitian tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru dan implikasinya terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari UPI Bandung dengan lokus penelitian pada SMK negeri di kota dan kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara sertifikasi guru dan kinerja guru sangat rendah ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,164.³

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, hasil penelitian di atas dapat memberikan gambaran bahwa proses peningkatan mutu pendidikan ini tidak secara otomatis tercapai melalui program sertifikasi. Diperlukan program perawatan dan pengembangan profesionalisme bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi, khususnya dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran. Di sisi lain, perlu kebijakan-kebijakan lanjutan yang dapat membingkai peningkatan kinerja guru lebih-lebih bagi guru yang telah memperoleh sertifikasi.

Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, memberikan bingkai baru

²http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197907232001121-CEPI_TRIATNA/LAP_FUNDAMENTAL_Cepi_2009_ADPEND/Banner_Penelitian.pdf; diakses 12 Juni 2012.

³<http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/1226/pengaruh-sertifikasi-guru-terhadap-kinerja-guru-dan-implikasinya-terhadap-prestasi-belajar-siswa-pada-smk-negeri-di-kota-bandung-dan-kabupaten-bandung>; diakses 12 Juni 2012).

dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Melihat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sertifikasi tampaknya lebih terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru dibanding peningkatan mutu, diperlukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru secara terus menerus dan sistematis di samping program sertifikasi. Diperlukan mekanisme-mekanisme yang dapat memastikan dilaksanakannya fungsi dan tugas guru sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) memiliki nilai strategis dalam menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

PK GURU menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya. Hasil PK GURU selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Secara umum, PK GURU memiliki 2 fungsi utama. *Pertama*, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. *Kedua*, untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut.

Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan melalui sertifikasi dan penilaian kinerja guru, berjalan sinergis dengan kepentingan guru melalui mekanisme *reward and punishment*. Jika peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi terkait langsung dengan pemberian kesejahteraan melalui tunjangan sertifikasi, maka peningkatan profesionalisme guru melalui Penilaian Kinerja Guru, terkait langsung dengan kenaikan pangkat guru. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme ini bukan semata-mata menjadi kepentingan pemerintah, tetapi menjadi kepentingan bersama antara pemerintah dan guru.

Oleh karena itu, kami menyambut baik langkah-langkah proaktif untuk mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru seperti yang berlangsung saat ini. Karena ini menjadi kepentingan bersama antara

pemerintah dan guru, maka kerjasama dan sikap proaktif semacam ini perlu untuk terus ditingkatkan. Kami juga memberikan penghargaan atas prakarsa Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridha Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2012
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama
Provinsi DIY

Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I
NIP. 19590327.198803.1.001

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA

Yang Terhormat,

1. Bapak Dr. Amin Haedari, M. Pd., Direktur PAIS, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag R.I.
2. Bapak Drs. Maskul Haji, M.S.I. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY
3. Para Narasumber Seminar Nasional Pendidikan
4. Para Undangan, Pemakalah serta peserta Nasional Pendidikan

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Para Hadirin yang Kami Hormati,

Dalam suasana yang berbahagia ini, pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat ijin dan perkenan-Nya. Shalawat dan Salam terhatur kepada junjungan Rasulullah saw. Pada hari ini kita dapat berkumpul di Auditorium Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun guna mengikuti serangkaian acara seminar nasional bidang kajian pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi DIY. Amin

Kami selanjutnya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Amin Haedari, M. Pd., Direktur PAIS, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, atas perkenannya menghadiri seminar kali ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemakalah dan seluruh peserta seminar, yang telah menyempatkan diri hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam seminar ini meski dalam kesibukan Bapak/Ibu yang begitu padat

Para Hadirin yang berbahagia,

Peran guru adalah sangat penting, karena mereka memiliki banyak tugas baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan tugas itu tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Konsekuensi logis dari tugas tersebut adalah guru harus mempunyai banyak peran dalam mendidik, di antaranya; sebagai korektor, inspirator, informator, fasilitator, pembimbing, mediator, supervisor dan sebagainya.

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (*Forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*Backward linkage*). *Forward linkage* berupa bahwa

pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Para Hadirin yang saya hormati,

Menyadari peran tersebut, sertifikasi guru bisa menjadi salah satu instrument vital untuk mendorong para guru secara terus menerus mengembangkan mutu dan kinerja pribadi maupun profesi serta mengikuti atau membaca informasi yang baru, dan mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif agar hadir sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Secara spesifik, para guru yang profesional diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut; a) Memiliki keahlian (*expert*) dalam bidang yang diajarkan. b) Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, dan c) Memiliki rasa kesejawatan dan kode etik serta memandang tugasnya sebagai karier hidup.

Dalam kerangka sertifikasi inilah mutlak diadakan penilaian kinerja guru secara teratur dan berkelanjutan. Sayangnya, pemahaman terhadap penilaian kinerja guru ini masih perlu ditingkatkan di semua tingkatan terutama dari para guru selaku sasarannya.

Untuk mensosialisasikan dan menghadapi pelaksanaan penilaian kinerja guru di tahun 2013, FAKULTAS AGAMA ISLAM - UCY berkerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi D.I.Y. melakukan perhelatan seminar nasional pendidikan bertema "**Penilaian Kinerja Guru Dalam Era Sertifikasi**". Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi persoalan seputar kepentingan, manfaat, dan format penilaian kinerja guru sehingga dapat memunculkan pemahaman yang komprehensif yang berdampak pada kelancaran dan kemudahan pelaksanaannya.

Para Hadirin yang berbahagia,

Pelaksanaan seminar ini merupakan komitmen UCY untuk berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang pendidikan dan keguruan. Hasil seminar ini tentunya sangat bermanfaat bagi FAI-UCY yang membawahi program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) selain Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS), apalagi saat ini FAI sedang melakukan proses pembenahan kurikulum program studi di lingkungannya. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah sedang mengembangkan konsentrasi hukum bisnis Syariah untuk berdampingan dengan Hukum Keluarga guna memperkokoh kajian Hukum Perdata Islam yang semakin kompleks. PAI sendiri memfokuskan pada pembenahan dan penajaman muatan kurikulum konsentrasi yang ada, yaitu Manajemen Pendidikan, Pendidikan Anak Usia

Dini dan Bimbingan Konseling sehingga para mahasiswa dan lulusannya dapat menguasai teori dan praktek sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan agama Islam dewasa ini.

Pengembangan dan Penguatan konsentrasi pada kedua prodi di lingkungan FAI ini juga merupakan respon UCY terhadap fenomena besarnya permintaan akan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Khusus di bidang keguruan dan pendidikan agama Islam, Kami berharap pengembangan bidang konsentrasi dalam kurikulum PAI ini dapat memberikan kontribusi dalam menyebarkan pengetahuan dan wawasan serta membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat belajar dan mendalami keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam.

Para Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrohim*, Seminar Pendidikan Nasional kerjasama FAI-UCY dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY dengan tema “**Penilaian Kinerja Guru Dalam Era Sertifikasi**” dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT. memberikan ilmu dan bimbingan yang bermanfaat dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin

Billahi Fi Sabilil Haqq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Rektor
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Joko Prabowo, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN
SUSUNAN PANITIA SEMINAR
KATA PENGANTAR
KATA SAMBUTAN

- KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. D.I.Y.
- REKTOR UCY

DAFTAR MAKALAH

No.	Penulis dan Judul	Hal.
1.	WENDY PRAYITNO, ST. M.T. <i>Penilaian Kinerja Guru Di Era Sertifikasi</i>	1-12
2.	AHMAD ZAIN SARNOTO, M.Pd., M.A. <i>Profesionalisme Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan</i>	13-27
3.	FATTAH HIDAYAT <i>Jenis Penilaian Kemampuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru</i>	28-32
4.	AHMAD SALIM <i>Peran Kepala Madrasah Dalam Penilaian Kinerja Guru Menuju Guru Profesional</i>	33-40
5.	TAUFIQ NUGROHO <i>Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Prodi PAI Dan Kemungkinan Implementasinya Di Perguruan Tinggi Agama Islam</i>	41-46
6.	IMROATUN <i>Membangun Permainan Cepat, Alamiah Dan Menyenangkan Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini</i>	47-56
7.	Hj. TRI HARTINI <i>Pentingnya Motivasi Dalam Menunjang Pembelajaran</i>	57-64
8.	ASRUL DASMALA <i>Memaknai Profesionalisme Guru Dalam Konteks Sertifikasi</i>	65-75
9.	MUHAMMAD NASRUDIN <i>Upaya Sekolah Dalam Peningkatan Profesi Guru</i>	76-80
10.	UMI MUSAROPAH <i>Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren At-Tanwir, Talun, Sumberrejo, Bojonegoro (1992-2004 M)</i>	81-88
11.	WANNEN PAKPAHAN <i>Implementasi Manajemen Strategi Pada Lembaga Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan</i>	89-100
12.	AGUNG PRIHANTORO <i>Berkaca Pada Polemik Tes Di AS</i>	101-104
13.	MUKHIBAT SYAUFA <i>Revitalisasi Peran Pendidik Pasca Sertifikasi</i>	105-119

PROFESIONALISME GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN⁴

AHMAD ZAIN SARNOTO, M.Pd, MA, Dr. (c).⁵

A. PENDAHULUAN

Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu *profesionalisme guru* yang masih belum memadai dan jelas hal ini ikut menentukan mutu pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional kita yang rendah, menurut beberapa pakar pendidikan, "salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya "mutu guru" itu sendiri di samping faktor-faktor yang lain. Maka, sebenarnya permasalahan guru di Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif, yaitu menyangkut semua aspek yang terkait berupa kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan administrasinya".⁶ Tetapi, "setiap kali membedah mutu pembelajaran, guru selalu *dijadikan kambing hitam*. Terlebih dengan mutu pendidikan Indonesia yang terus terpuruk dibanding negara tetangga".⁷

Sumber permasalahan pendidikan di Indonesia, sebenarnya bukan hanya pada "persoalan guru" saja, tetapi persoalan perhatian pemerintah dan masyarakat, dana, kurikulum, metologi, manajemen, pimpinan sekolah yang memiliki kemampuan profesional dan integritas dalam mengelola pendidikan.

Rendahnya kualitas tenaga kependidikan, merupakan masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Katakan saja sebagai contoh, motivasi menjadi tenaga pendidik [guru] di kebanyakan sekolah-sekolah Islam selama ini dikarenakan dan hanya dilandasi oleh faktor pengabdian dan keikhlasan, sedangkan dari sisi kemampuan, kecakapan dan disiplin ilmu dikatakan masih rendah

Tuntutan terhadap lulusan dan layanan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang memungkinkan peluang lembaga pendidikan asing membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan antar lembaga penyelenggara pendidikan dan pasar kerja akan semakin berat.

⁴ Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan "Penilaian Kinerja Guru dalam Era Sertifikasi" Yogyakarta, 14 Juni 2012

⁵ Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Konsultan Pendidikan Indonesia & Ketum PP Education Care Society

⁶ Baca, Purwanto, <http://www.pustekom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>

⁷ Kompas, 10 Maret 2004, dalam Naniek Setijadi, From:<http://tpj.bpkpenabur.or.id/> akses, Selasa, 26/4/2005, jam 10.15]

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Dalam tulisan ini dibahas tentang profesionalisme guru dan peningkatan mutu pendidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Profesionalisme Guru

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu: profesi, semi profesi, terampil, tidak terampil, dan quasi profesi. Gilley dan Egglan (1989) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu :

- a. Ilmu pengetahuan tertentu
- b. Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan
- c. Berkaitan dengan kepentingan umum

Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga merupakan standar pengukuran profesi guru. Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status professional (peningkatan status). Secara teoritis menurut Gilley dan Egglan (1989) pengertian professional dapat didekati dengan empat prespektif pendekatan yaitu orientasi filosofis, perkembangan bertahap, orientasi karakteristik, dan orientasi non-tradisional. Yaitu:

Pertama, Orientasi Filosofi. Ada tiga pendekatan dalam orientasi filosofi, yaitu pertama lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lissensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan kedua yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu, yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan yang bersifat pribadi. Yang penting bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh dan bermanfaat bagi penggunaannya. Pendekatan ketiga: *electic*, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber, sistim, dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan ini berpandangan bahwa pandangan individu tidak akan lebih baik dari pandangan kolektif yang disepakati bersama. Sertifikasi profesi memang diperlukan, tetapi tergantung pada tuntutan penggunaannya.

Kedua, Orientasi Perkembangan menekankan pada enam langkah pengembangan profesionalisasi, yaitu:

- a. Dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat terhadap profesi.
- b. Identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu.
- c. Para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu lembaga.
- d. Penepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu.
- e. Penentuan kode etik.
- f. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu (termasuk syarat akademis) dan pengalaman di lapangan.

Ketiga, Orientasi Karakteristik. Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi/pekerjaan. Ada delapan karakteristik pengembangan profesionalisasi, satu dengan yang lain saling terkait:

- a. Kode etik
- b. Pengetahuan yang terorganisir
- c. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus
- d. Tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan
- e. Sertifikat keahlian
- f. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab
- g. Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi
- h. Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota profesi

Keempat. Orientasi Non-Tradisional. Perspektif pendekatan yang keempat yaitu prespektif non-tradisional yang menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya termasuk pentingnya sertifikasi profesional dan perlunya standarisasi profesi untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan. Tentu saja, pekerjaan guru tidak diragukan untuk dapat dikatakan sebagai profesi pendidikan dan pengajaran. Namun, hingga kini “pekerjaan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran” ini masih sering dianggap dapat dilakukan oleh siapa saja. Inilah tantangan bagi profesi guru. Paling tidak hal ini masih sering terjadi di lapangan. Profesionalisme guru perlu didukung oleh suatu kode etik guru yang berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Kelembagaan profesi guru sangat diperlukan untuk menghindari terkotak-kotaknya guru karena alasan struktur birokratisasi atau kepentingan politik tertentu.

Sedangkan menurut Syafruddin Nurdin, kata profesional berasal dari *profesi* yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai prangkat dasar untuk di implementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.⁸ Sedang persyaratannya menurut Uzer Usman adalah:

- Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- Menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan.
- Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.
- Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti guru dengan muridnya.
- Diakui oleh masyarakat, karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan.⁹

Dari pengertian di atas, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, profesi juga memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam, ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan. Jika disandingkan kata *professional* kepada guru, maka menurut Danim, “guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan”¹⁰

Kalau begitu guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkannya kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Dengan cara demikian menurut Uzer Usman “Dia akan memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dalam intraksi belajar mengajar sehingga dengan kemampuannya baik dalam hal metode mengajar, gaya mengajar ataupun penyampaian materi pelajaran bisa menyukseskan intraksi belajar mengajar atau pun proses belajar mengajar”.¹¹

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

⁸ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), h.. 16

⁹Muhammad Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h..15

¹⁰Sudarman Danim, *Media Komunikasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h..53

¹¹ Muhammad Uzer Usman *op. cit.*, h.. 9

Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.¹²

2. Konsep Mutu dalam Pendidikan

Isu tentang mutu sangat deras berkembang di lingkungan pendidikan pada penghujung abad XX terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya adalah karena dari tahun ke tahun lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi sebagai angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja semakin besar. Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya mutu lulusan, dalam arti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dikuasainya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut lapangan kerja yang ada atau sangat rendah kemampuannya untuk mandiri dalam bekerja.

Mutu adalah sifat dari benda dan jasa. Setiap orang selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain, sebaliknya orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Ini artinya, mutu bukanlah sesuatu yang baru, karena mutu adalah naluri manusia. Benda dan jasa sebagai produk dituntut mutunya, sehingga orang lain yang menggunakan puas karenanya. Dengan demikian, mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

¹² Syaiful Bahri Djamarah. (2002). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 74

Benda dan jasa sebagai hasil kegiatan manusia yang secara sadar dilakukannya disebut “kinerja”. Kinerja itulah yang dituntut mutunya, sehingga muncul istilah “mutu kinerja manusia”. Suatu kinerja disebut bermutu jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Oleh karena itu, maka suatu produk atau jasa sebagai kinerja harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Dalam pembicaraan tentang mutu, terdapat unsur-unsur yang terkait, yaitu: produk dan jasa, penghasil produk/jasa, pelanggan, kebutuhan dan harapan, produk/jasa yang bermutu dan kepuasan.

Produk dan jasa adalah hasil yang diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang yang membuat produk atau jasa disebut penghasil produk/jasa, sedangkan orang yang memerlukan produk/jasa itu disebut pelanggan. Adapun kebutuhan dan harapan adalah cerminan dari apa saja yang diharapkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dari pihak penghasil produk/jasa. Adanya produk/jasa yang disebut bermutu bila dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan dan harapan pelanggan/ penggunaannya, yang ditandai dengan kepuasan. Ciri-ciri mutu (sebagai bentuk pelayanan pelanggan) ditandai dengan: (1) ketepatan waktu pelayanan, (2) akurasi pelayanan, (3) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan), (4) bertanggung jawab atas segala keluhan (complain) pelanggan, (5) kelengkapan pelayanan, (6) kemudahan mendapatkan pelayanan, (7) variasi layanan, (8) pelayanan pribadi, (9) kenyamanan, (10) dan ketersediaan atribut pendukung. Setiap produk/jasa yang bermutu memberikan pelayanan tepat waktu seperti yang disepakati dengan pelanggan. Kemoloran atau tertundanya waktu dari yang telah disepakati menjadi cacat mutu karena cidera janji.¹³

Adapun sifat-sifat pokok mutu jasa, menurut Slamet (1999) adalah mengandung unsur-unsur: (1) keterpercayaan (reliability), (2) keterjaminan (assurance), (3) penampilan (tangibility), (4) perhatian (emphaty), dan (5) ketanggapan (responsiveness). Keterpercayaan dapat dihasilkan dari sikap dan tindakan seperti: jujur, tepat waktu pelayanan, terjaminnya rasa aman dengan produk/jasa yang dipergunakan/diperoleh, dan ketersediaan produk/jasa saat dibutuhkan pelanggan.¹⁴

Beeby dalam A.Sabur¹⁵ melihat mutu dalam pendidikan dari tiga perspektif yaitu: perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan

¹³ Slamet, Margono, 1999. *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sabur A (1998) *Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi*, Thesis Tidak Diterbitkan IKIP Bandung, hlm.33

ekonomi. Lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja didalam berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan, dan pembebasan kebodohan. Dalam konteks persekolahan mutu dipandang sebagai kemampuan sekolah untuk merespon dan memenuhi kebutuhan murid dan masyarakat, hal ini sebagaimana dikemukakan Phillip (1977:57): *'quality in school is, in part at least, defined by the school' ability to respond to and satisfy these needs.*“. Lebih lanjut dikemukakan :*“ school are not only about meeting the needs of children; they must meet the needs of society as well.*

Sedangkan menurut perspektif pendidikan, melihat mutu pendidikan dari sisi pengayaan (*richness*) dari proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis. Menurut Beeby mutu dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang bermutu yang berbeda dari pendidikan yang tidak bermutu. Untuk sampai kepada konsep ini maka mutu dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk maupun dari sisi internal dan *sisi fitness* atau kesesuaian.¹⁶

Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Sekolah yang berada di daerah kumuh dan sekolah yang beroperasi di daerah elit, misalnya, meskipun menerima calon siswa yang sama, tetapi karena kualifikasi guru, kelengkapan sarana dan prasarana, suasana belajar yang berbeda, pengelolaan yang tingkat efisiensinya juga tidak sama, maka proses pendidikan pada sekolah di daerah elit akan jauh lebih baik karena faktor ketepatan, kelengkapan, dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna. Keunggulan dalam proses pendidikan dengan sendirinya akan menghasilkan produk yang berbeda. Tingkat kemampuan lulusan dalam arti penguasaan ilmu, keterampilan dan pengalaman para lulusan sekolah elit yang proses pendidikan lebih baik, mutunya akan berbeda dari sekolah di daerah kumuh. Dengan demikian mutu proses akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda.

Mutu dapat juga dikaji dari sudut internal efisiensi dan *fitness*, secara internal efisiensi, pendidikan yang bermutu itu adalah bilamana tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipenuhi atau dicapai. Sedangkan mutu pendidikan dalam pengertian *fitness* atau kesesuaian adalah bilamana lulusan yang dihasilkan memenuhi

¹⁶ Ibid, hlm.35

kebutuhan tenaga kerja, dipasaran, baik di sektor industri maupun sektor kegiatan domestik.

Dari pandangan Beeby di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan itu dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur oleh ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan serta peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Sedangkan mutu pendidikan dilihat dari sisi produk yakni apabila lulusan/siswa (1) dapat menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan di sekolah, (2) memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena ada kesesuaian antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan hidupnya, (3) mampu memanfaatkan secara fungsional ilmu pengetahuan dan teknologi hasil belajarnya demi perbaikan kehidupannya; dan (4) dapat dengan mudah memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan tuntutan dan harapan dunia kerja.

Edward Sallis,¹⁷ mengemukakan konsep mutu dalam kaitan dengan Total Quality Management (TQM), dimana menurutnya mutu itu harus dipandang sebagai konsep yang relatif bukan konsep yang absolut. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu, dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan eksklusif. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Cara pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi, sering disimpulkan sebagai 'sesuai dengan tujuan dan manfaat'. Kadangkala definisi ini sering dinamai definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Mutu didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan mutu, yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar-standar yang telah ditetapkan tadi, maka produk atau jasa itu bermutu.

¹⁷ Sallis, Edward. 1993. Total Quality Management in Education, Kogam Page, London, hlm.22

Sallis mengidentifikasi dan mengelompokan konsumen atau pelanggan pendidikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *pelanggan internal* dan *pelanggan eksternal*. Pelanggan internal meliputi para pendidik dan staf pendukung. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi pelanggan eksternal utama adalah peserta didik; pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua, pemerintah dan employers; serta pelanggan eksternal tersier adalah pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat. Sallis menyarankan agar pendidikan dipandang sebagai industri jasa, dan usaha memenuhi kebutuhan peserta didik harus menjadi fokus utama dalam mengelola mutu. Sekalipun demikian menurutnya tidak berarti harus mengabaikan pandangan-pandangan dari kelompok pelanggan lainnya.¹⁸

Sedangkan Philip H.Coombs (dalam A.Sabur) melihat konsep mutu pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi belajar, seperti yang dikaitkan dengan kurikulum dan standarnya saja tetapi mutu harus dilihat dari segi relevansi dan sejauh mana apa yang diajarkan dan dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan belajar saat ini dan untuk masa yang akan datang. Lebih jauh dikemukakan bahwa masalah mutu pendidikan hendaknya dikaitkan dengan keseluruhan dimensi mutu secara sistemik yang berubah dari masa ke masa.¹⁹

Mutu pendidikan dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan seluruh faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Seiring dengan kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus-menerus berkembang. Untuk menjawab tentang tersebut, sekolah harus terus-menerus meningkatkan mutu lulusannya, menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat

Dari beberapa pendapat tentang mutu pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu itu merupakan derajat sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi atau penilaian para penghasil dan atau pihak pemakai. Agar derajat mutu sesuatu itu dapat ditetapkan, maka atribut-atribut sesuatu beserta standar atau kriteria-kriteria kebermutuannya terlebih dahulu harus ditetapkan.

Mutu pendidikan itu bersifat multi dimensi yang meliputi aspek input, proses dan keluaran (*output dan outcomes*). Oleh karena itu, indikator dan standar mutu pendidikan dikembangkan secara *holistic* mulai dari *input*, proses dan keluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Mutu

¹⁸ Ibid, hlm.38

¹⁹ Sabur A (1998) , Op cit, hlm.53

Institusi Pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai pelayanan/services yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada peserta didik maupun kepada tenaga staf pengajar untuk terjadinya proses pembelajaran yang bermutu sehingga lulusan dapat berguna dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Berbagai pelayanan-services institusi pendidikan dapat dibagi atas lima jenis pokok jasa pelayanan, yaitu (a) pelayanan administrasi pendidikan (*administration services*); (b) pelayanan pembelajaran (*curriculum services*); (c) pelayanan ko-kurikuler (*cocurriculum services*); (d) pelayanan penelitian (*researches services*) dan (e) pelayanan keinformasian pendidikan (*information sistem services*).

Seperti telah disampaikan di awal bahwa konsep mutu bagi pelanggan berbeda-beda. Robert dan Prevost (dalam Cristopher,1996), berdasarkan hasil penelitiannya telah membuktikan adanya perbedaan dimensi mutu yang meliputi:

- 1) Bagi pemakai jasa pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada dimensi ketanggapan pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai customers, kepedulian, kelancaran komunikasi/hubungan antara peserta didik dan petugas pendidikan
- 2) Bagi penyelenggara pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada kesesuaian pelayanan pendidikan yang diselenggarakan dalam perkembangan ilmu dan otonomi profesi pendidik.
- 3) Bagi penyandang dana pelayanan pendidikan, mutu pelayanan lebih terkait kepada efisiensi pemakaian sumber dana dan kewajaran pembiayaan.

Pendapat lain yang mendukung pernyataan tentang mutu pelayanan pendidikan yaitu: 1) Dimensi mutu dari seorang *customer* (peserta didik), dikaitkan dengan kompetensi keilmuannya, kecepatan pelayanan, kepuasan terhadap lingkungan fisik, dosen yang ramah, terampil, profesional dan biaya pendidikan yang terjangkau. Persepsi mutu bagi peserta didik yang paling utama adalah kepuasan. 2) Dimensi mutu dari seorang guru/dosen adalah kelengkapan peralatan, sarana penunjang mengajar dan metode mengajar serta hasil proses belajar mengajar.

Menurut pandangan Umaedi²⁰ dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan, yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan

²⁰ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 1999, hlm.7

berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (Hasil ulangan atau ujian), dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni, bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, kebersihan, dsb.

3. Meningkatkan Profesionalisme Guru dengan Sertifikasi

Suyanto, menyatakan bahwa "banyak program pendidikan baru yang inovatif diberlakukan oleh pemerintah , seperti *broad based education*, *life skills*, manajemen pendidikan berbasis sekolah, *contextual teaching-learning [CTL]*, evaluasi belajar model portofolio, dan yang terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Semua itu kurang atau bahkan tidak mengikutsertakan guru sebagai variabel penting dalam pelaksanaan program-program itu, padahal semua program baru itu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Lantas, bagaimana peran guru kita dalam pembaharuan dan inovasi pendidikan itu? Inilah persoalannya. Dengan banyaknya program baru itu, semestinya para guru didorong untuk memiliki profesionalisme yang lebih tinggi. Upaya peningkatan kualitas guru, seharusnya juga diikuti dengan kesejahteraan yang lebih memadai, tetapi kenyataan tidaklah seperti itu dan banyaknya program baru itu justru menambah beban kerja guru..²¹

Lebih lanjut Suyanto menyatakan, "penggagas pembaharuan pendidikan memiliki asumsi, bahwa guru dengan serta merta dapat melakukan apa saja yang menjadi program pembaharuan yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, asumsi inilah yang tidak benar. Sebab, kenyataannya guru harus mendapatkan *retraining* yang memadai dan tersistem untuk dapat melakukan berbagai pembaharuan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat kembali kemampuan riil yang dimiliki guru untuk melakukan atau mengadopsi setiap inovasi dibidang pendidikan ²².

Maka, upaya peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya harus terpulang dan ditentukan oleh para guru itu sendiri serta harus dimulai sejak awal rekruting guru. Hal ini, sebagaimana pernah disampaikan Muhammad Surya, bahwa pengembangan profesionalisme guru seharusnya sudah dimulai sejak masa perekrutan. Selain itu perlu didukung fasilitas

²¹ Suyanto, [http://www.Suara merdeka.com...](http://www.Suara%20merdeka.com...), Ibid

²² Ibid

yang memadai. Perbaikan kesejahteraan guru merupakan agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan.²³

Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalismenya. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu [1] persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, [2] sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik, [3] untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belajar secara terus menerus sepanjang hayat, [4] guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau *networking*. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui *networking* inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya dan akses sosial yang lainnya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, semua sektor dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada kastemer atau pengguna. Maka, Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna yaitu siswa, orangtua dan sekolah sebagai *stakeholder*. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak ketinggalan tidak “gaptekn” [gagap teknologi] dalam

²³ Kompas, 30 Januari 2003

kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD dan komputer [hard technologies] dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan [soft technologies] .²⁴ menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab, perkembangan teknologi “informasi dan internet” merupakan faktor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga akan berpengaruh pada paradigm pendidikan termasuk profesi guru dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan era reformasi pendidikan akan menghasilkan suatu tekanan atau *pressure* dan tuntutan terhadap profesionalisme guru dalam mendayagunakan teknologi komunikasi informasi tersebut, termasuk dalam hal pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya profesinya, sebab profesi guru termasuk profesi yang kompetitif. Dengan demikian, guru harus siap dan bersedia untuk diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional yang terus berkembang. Sebab, di masa depan dapat dipastikan bahwa profil kelayakan guru akan ditekankan kepada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa yang dimulai dari merencanakan atau merancang, menganalisis, mengembangkan, mengimplementasikan dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan.

C. PENUTUP

Dalam rangka mencapai mutu yang tinggi dalam bidang pendidikan, peranan guru sangatlah penting bahkan sangat utama. Untuk itu, maka profesionalisme guru harus ditegakkan dengan cara pemenuhan syarat-syarat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru, baik di bidang penguasaan keahlian materi keilmuan maupun metodologi. Guru harus bertanggungjawab atas tugas-tugasnya dan harus mengembangkan kesejawatan dengan sesama guru melalui keikutsertaan dan pengembangan organisasi profesi guru.

Untuk mencapai kondisi guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugas profesinya. Karenanya, maka kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi.

Dalam perkembangannya, disadari bahwa profesi guru belum dalam posisi yang ideal seperti yang diharapkan, namun harus terus diperjuangkan menuju yang terbaik. Pada saat diberlakukannya otonomi daerah dan

²⁴ baca : Purwanto, <http://www.pustekom...>,

desentralisasi pendidikan yang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, dipahami bahwa banyak tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi untuk dapat diselesaikan oleh para guru dan lembaga penyelenggara pendidikan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain: berubahnya peran guru dalam manajemen proses belajar mengajar, kurikulum yang terdesentralisasi, pemanfaatan secara optimal sumber-sumber belajar lain dan teknologi informasi, usaha pencapaian layanan mutu pendidikan yang optimal, dan penegakan profesionalisme guru. Para guru mempunyai tantangan untuk dapat beradaptasi dengan sebaik-baiknya dalam situasi transisi, agar dapat memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya. Menyikapi hal-hal demikian, tidak lain maka para guru haruslah dapat mengembangkan suatu perilaku adaptif agar berhasil mengemban profesinya di era global ini. sertifikasi guru perlu dihargai sebagai wujud perhatian terhadap nasib guru dan dalam rangka menunjang profesionalisme guru yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sudrajat. *Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah*. <http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com>, (2007).
- E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2002
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Terj.,Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung. 1985
- Gilley, Jerry W. dan Steven A. Egglend, 1989. *Principles of Human Resources Development*. New York: Addison Wesley Pub. Company. Inc
- Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Safiria Insania Press dan MSI, Yogyakarta. 2003
- _____, , *Tantangan Pendidikan Islam di Era Informasi [Pergeseran Paradigma Pendidikan Islam Indonesia di Era Informasi]*, *Jurnal Studi Islam, MUKADDIMAH*, 2004 Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 16 TH.X/2004, ISSN:0853-6759,Yogyakarta.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi (ed). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta
- Kompas, *Rencana Badan Independen Sertifikasi Guru*, From: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/24/humaniora/1398342.htm>., akses, 17/11/2004.
- _____, *Hati-hati Sertifikasi Guru*, From: [http://66.102.9.104/search?q=](http://66.102.9.104/search?q=cache:)
[cache:](http://66.102.9.104/search?q=cache:)

c60QtyluWW4J:www.kompas.com/kompas-ceta., akses. 27/11/2004.

Maman, , *Upaya Memantapkan Profesionalisme Guru*, Pikiran Rakyat, Bandung, 24 Maret 2005, From: <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/24/1105.htm>, Selasa 26 April 2005, jam 10.30, 2005

Muhammad Surya, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Kompas, 30 Januari 2003, Jakarta.

Naniek Setijadi, *Tantangan Profesionalisme Guru Masa Depan*, From: http://tpj.bpkpenabur.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=27, akses, Selasa, 26 April 2005, jam 10.15, 2004

Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, From: <http://www.detik.com/net/onno/jurnal/2004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml>, akses, 16 Mei 2002.

Paul Suparno, *Guru Demokratis di Era Reformasi*, Grasindo, Jakarta, 2004

Purwanto, *Profesionalisme Guru*, From: <http://www.pustekkom.go.id/teknodik/t10/10-7.htm>, akses, Senin, 14-2-2005.

P. Ruspenti, *Profesionalisme Guru, Harapan dan Kenyataan*, From: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/0310.htm>, Selasa 26 April 2005, jam 10.30, 2004

Sabur A(1998) *Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi*, Thesis Tidak Diterbitkan IKIP Bandung

Sallis, Edward. 1993. *Total Quality Management in Education*, Kogam Page, London.

Slamet, Margono, 1999. *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, IPB Bogor.

Surya, Muhammad. 2003. *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu.

Syaiful Bahri Djamarah. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Suyanto, *Mobilitas Horizontal bagi Guru Bermutu Suara Merdeka*, Kamis, 30 Desember 2004, From: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/30/opi04.htm>, Selasa 26 April 2005, jam. 10.30, 2004

Umaedi (1999) *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Ditjen Dikdasmen Depdikna

Winarno Surakhmad, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: <http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/200006/artikel2.htm>, 2002

Wen, Sayling. 2003. *Future of Education (Masa Depan Pendidikan)*, alih bahasa Arvin Saputra, Batam: Lucky Publisher